

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta.
- Ari H. Gunawan, 2000, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora, 2019, *Profil Kesehatan Kabupaten Blora 2018*, BPS Kabupaten Blora.
- CST. Kansil, 2004, *Pemerintahan Daerah di Indonesia, Hukum Administrasi Daerah*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, 2019, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018*, Pemerintah Kabupaten Blora.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo.
- Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*, Jakarta : Kompas Media Nusantara.
- Hanif Nurchlis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta : PT. Grasindo.
- Hari Sabarno, 2007, *Untaian Pemikiran Otonomi Daerah, Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Horoepoetri, Arimbi, Achmad Santosa, 2003, *Peran Serta Masyarakat Dalam Mengelola Lingkungan*, Walhi, Jakarta :Walhi.
- Jimly Assiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Balai Pustaka, Jakarta.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, *Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*.
- Lon Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Conn : Yale University Press.

- M. Fauzan, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah*, Yogyakarta : UII Press
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2005, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Siswanto Sunarno, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulastomo, 2007, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Sebuah Introduksi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- The New Oxford Illustrated Dictionary, 1982, Oxford University Press
- Yohandarwati dkk, 2003, *Sistem Perlindungan dan jaminan Sosial (Suatu Kajian Awal)*, Bappenas, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI)

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir menjadi Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*fraud*) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (*fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 43/2016 tentang Standar Pelayanan Minimal di bidang Kesehatan.

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.

C. Jurnal

Masadib Akmal Vyandri, Implementasi Kebijakan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya (Studi tentang Kepesertaan PBI Jaminan Kesehatan dalam Menghakses Kesehatan), *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Oktober 2016, Vol. 2 No. 2.

Nadia Ika Puspita Dewi, Chriswardani Suryawati, Sudiro, “Analisis Kesiapan Peran Tim Safeguarding JKN Dinas Kesehatan Kota Semarang Dalam Memfasilitasi Pelaksanaan Koordinasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan” *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, Volume 3, Nomor 2, April 2015

D. Lain-lain

Arti Meningkatkan, (<https://lektur.id>, diakses 30 Maret 2020)

- Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, Panduan Layanan Bagi Peserta BPJS Kesehatan, (<http://www.sappk.itb.ac.id>, diakses 14 Februari 2020).
- BPJS Kesehatan, Panduan Praktis Kesehatan, (<http://www.bpjs-kesehatan.go.id>, diakses 14 Februari 2020)
- Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, (<http://hukum.kompasiana.com>, diakses 7 Oktober 2019).
- Eks Peserta Jamkesda dapat JKN-KIS di Puskesmas, (<http://infopublik.id>, diakses 23 Februari 2020).
- Jaminan Kesehatan Masyarakat, (<http://www.pancurbatu.wordpress.com>, diakses 20 Februari 2020).
- Pelayanan Kesehatan di Blora Upaya Peningkatan Mutu SDM di Semester Pertama, (<https://www.bloranews.com>, diakses 20 Februari 2020).
- Pentingnya Peran Pemda dalam Program JKN-KIS, (<https://www.bpjs-kesehatan.go.id>, diakses 7 Oktober 2019).
- Pencapaian Target UHC BPJS Kesehatan Terkendala Faktor Kesadaran Masyarakat, (<https://pasfmpati.com>, diakses 7 Oktober 2019).
- Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM, “Peran dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dalam Pengorganisasian Pelaksanaan Urusan Kesehatan”, Policy Brief, 20 Maret 2014 (<https://kanalpengetahuan.fk.ugm.ac.id>, diakses 20 Februari 2020).
- Waspada Online, “Bantu 86,4 juta warga miskin, pemerintah rogoh Rp 20 T”, (<http://waspada.co.id>, diakses 16 Februari 2020).